

Geneva Internet Platform

Digital Watch

NEWSLETTER
INDONESIA

Anda menerima banyak potongan informasi terkait kebijakan digital. Kami juga menerimanya. Kami mengurai, membuatnya kontekstual serta menganalisisnya. Lalu kami meringkasnya untuk anda.

TREND KEBIJAKAN DIGITAL BULAN JANUARI

Techlash: industri Internet dalam pengamatan ketat

Para pemimpin dunia dan sektor swasta mendiskusikan peluang maupun tantangan digital di pertemuan tahunan World Economic Forum (WEF) di Davos. Pertemuan membahas isu yang menjadi perhatian di tahun 2017 dan tetap relevan sampai sekarang. [Lebih lanjut di halaman 7](#)

Salah satu isu utama adalah 'bertambahnya sifat monopolistik perusahaan besar Teknologi Informasi' -- isu yang diusung oleh investor dan filantropis George Soros. Soros secara terbuka mengkritik perusahaan teknologi, terutama Facebook dan Google, telah memanipulasi perhatian serta membuat teknik sehingga para pengguna kecanduan layanan mereka.

'Mereka yang melakukan monopoli di Internet tidak memiliki keinginan ataupun menunjukkan upaya melindungi masyarakat yang terdampak bisnis mereka,' kata Soros. Alih-alih, pemerintah yang justru memiliki kewajiban untuk melindungi itu.

Serangan terhadap perusahaan Internet dimulai ketika Google mengirimkan laporan pertama ke Uni Eropa tentang bagaimana kepatuhan mereka terhadap aturan antimonopoli, yang jatuh tempo pada 28 Januari.

Denda sebesar €2,4 miliar menjadi pengingat bagaimana kuatnya para raksasa digital ini dalam menyalahgunakan posisi mereka di pasar, seperti dikatakan Soros. Seiring dengan menguatnya hukum perlindungan data pribadi dan privasi, Soros mengatakan bahwa saat ini hanya tinggal menunggu waktu sampai dominasi perusahaan Internet runtuh akibat tekanan peraturan dan perpajakan Uni Eropa yang makin menguat.

Pemerintahan meningkatkan upaya menekan perusahaan untuk menghapus konten ilegal

Pemerintah menunjukkan posisi lebih kuat dalam menangani konten ilegal di Internet. Undang-undang Jerman yang baru, NetzDG, mengharuskan platform Internet dengan lebih dari dua juta pengguna untuk melakukan pelaporan secara proaktif serta segera menghapus konten ilegal. Pemerintah juga akan memberikan denda jika mereka tidak mematuhi peraturan.

Konten ilegal yang telah ditandai harus dihapus dalam 24 jam, atau dalam satu minggu apabila kasusnya sangat kompleks. Salah satu perhatian utamanya adalah, apakah para penjahat akan dihukum setelah konten itu dihapus.

[Continued on page 3](#)



Amazon telah membuka toko cabang baru di Seattle, WA, Amerika. Toko cabang pertama dari rangkaian toko Amazon ini beroperasi tanpa kasir dan pegawai. Konsumen dengan mudah bisa masuk ke toko dengan memberikan kode aplikasi Amazon Go.

Ketika mereka mengambil barang dari rak, barang itu kemudian masuk ke kantong virtual dan ketika mereka mengembalikan kembali ke rak, maka barang itu dipindah dari kantong virtual. Toko ini menggunakan kamera yang dikendalikan komputer, pembelajaran oleh mesin, serta algoritma dan sensor untuk melihat apa yang dibeli konsumen.

DI EDISI INI

TREN



Kami memulai dengan gambaran umum tren utama di area seperti perpajakan dan kebijakan konten.

[Lebih lanjut di halaman 1, 3](#)

BAROMETER



Keamanan, hak asasi digital, e-dagang dan netralitas jaringan adalah isu utama bulan ini. Baca ringkasan perkembangan baru.

[Lebih lanjut di halaman 4, 5](#)

KEBIJAKAN DIGITAL DI DAVOS



Para pemimpin dunia bertemu di Davos untuk pertemuan tahunan WEF dan mendiskusikan isu hangat saat ini. Kebijakan digital adalah salah satunya.

[Lebih lanjut di halaman 6](#)

TREN 2017 DAN PREDIKSI 2018



Bagaimana perkembangan kebijakan digital tahun 2017 dan apa yang bisa diharapkan di tahun 2018?

[Lebih lanjut di halaman 7, 8](#)



Edisi No. 27 Geneva Digital Watch newsletter. Diterbitkan tanggal 31 Januari 2018 oleh Geneva Internet Platform (GIP) dan DiploFoundation | Penerjemah ke Bahasa Indonesia: Shita Laksmi, Oni Budipramono, Anton Muhajir | Kontributor: Stephanie Borg Psaila, Jovan Kurbalija, Virginia Paque, Roxana Radu, Barbara Rosen Jacobson, Sorina Teleanu | Desain oleh Viktor Mijatović, layout oleh Aleksandar Nedeljkov, Diplo's CreativeLab | Selain newsletter, Anda bisa mendapatkan informasi lebih dalam terkait perkembangan kebijakan digital di GIP Digital Watch Observatory (<http://dig.watch>) dan ikut diskusi setiap Selasa terakhir setiap bulan di hub lokal negara Anda, atau di GIP (<http://dig.watch/briefings>) | Kirim komentar Anda ke digitalwatch@diplomacy.edu

Kelompok Kerja International Telecommunication Union (ITU)

Kelompok Ahli ini bertugas untuk mengkaji Peraturan Telekomunikasi Internasional (ITRs) yang bertemu pada 17–19 Januari, dan meneruskan diskusi apakah ITRs perlu direvisi. Beberapa negara anggota mengatakan bahwa revisi tidak diperlukan karena ITRs tetap harus fokus di telekomunikasi internasional. Sementara sebagian lainnya meminta perubahan yang substantif, termasuk memasukkan isu keamanan siber dan perlindungan data.

Dewan Kelompok Kerja ITU (CWG) untuk Isu Kebijakan Publik Internasional terkait Internet melakukan konsultasi terbuka pada 22 Januari dengan judul 'Menjembatani kesenjangan digital gender'. Rekomendasi dibuat terkait bagaimana pemangku kepentingan bisa meningkatkan peran perempuan melalui teknologi digital. Topik ini juga dibahas dalam rapat kelompok pada 25–26 Januari.

CWG untuk isu Perlindungan Anak Online bertemu pada 23 Januari mendiskusikan hasil konsultasi dengan anak-anak muda secara daring terkait literasi digital. Para peserta juga membagi pengalaman di beragam wilayah seperti upaya mengurangi pornografi anak dan menghadapi perundungan.

CWG untuk WSIS: Implementasi atas Hasil pada 24–25 Januari mengkaji aktivitas ITU terkait dengan hasil dari World Summit on the Information Society (WSIS), sambil membuat rekomendasi untuk memperkuat hubungan antara WSIS dengan proses Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs).

Big Data, Masalah Besar?

Diskusi meja bundar untuk 'Tantangan dan Peluang dalam konteks Kepemilikan Data, Privasi dan Perlindungan', yang diadakan pada 24 Januari diselenggarakan Carlo Schmid-Network untuk International Politics dan diselenggarakan oleh Delegasi Uni Eropa untuk PBB di Jenewa. Diskusi ini dihadiri 70 orang sebagian besar adalah profesional muda di organisasi internasional. Mereka terlibat aktif di diskusi panel membahas peluang dan tantangan big data dalam isu kesehatan global, perdagangan, kemanusiaan, migrasi dan diplomasi. Kendati peluang big data dalam beragam isu ini semakin jelas, banyak orang mengatakan pengaturan big data dan kepemilikan data menjadi sangat penting. Bukan hanya untuk melindungi hak privasi, tetapi memastikan semakin banyak orang bisa mendapatkan keuntungan dari peluang big data.

Forum WSIS 2018 – Proses Konsultasi Terbuka – Rapat Kedua

Forum WSIS akan diadakan pada 19-23 Maret tahun ini. Persiapannya sudah dimulai akhir tahun 2017. Konsultasi terbuka pada 24 Januari memberikan kesempatan untuk memberikan pembaruan informasi kepada komunitas terkait perbaikan, perubahan serta tenggat waktu untuk WSIS tahun ini. Seperti tahun lalu, WSIS akan menampilkan 17 hadiah Proyek, foto kontes WSIS dan lebih dari 55 pameran dari semua pemangku kepentingan, *hackathon*, TEDx dan banyak lokakarya. Hal istimewa tahun ini adalah perayaan 15 tahun Geneva Plan of Action, yang persiapannya sedang berjalan untuk komponen tingkat tinggi maupun acara sosial. Lebih dari 2.500 peserta diharapkan hadir dan mendorong adanya pendaftaran awal.

Kelompok Kerja CSTD untuk Peningkatan Kerja Sama – Rapat Kelima

WGEC (Working Group on Enhanced Cooperation) dibentuk oleh Rapat Umum PBB tahun 2017 dengan tujuan 'membuat rekomendasi tentang bagaimana implementasi peningkatan kerja sama tindak lanjut Agenda Tunis'. Rapat kelima dan terakhir WGEC, 29–31 Januari diharapkan memproduksi laporan akhir yang menindaklanjuti draf laporan kedua yang dibuat oleh ketua kelompok kerja.

Laporan kedua ini memberikan gambaran umum atas proses yang sudah dibuat oleh kelompok kerja untuk mendefinisikan peningkatan kerja sama dan membuat rekomendasi: karakter utama dan prinsip yang memandu implementasi dari peningkatan kerja sama dan beberapa cara untuk mempromosikan dialog serta koordinasi antar-negara anggota dan pemangku kepentingan lain, dengan menggunakan kerja yang sudah ada serta inisiatif yang sudah dilakukan di tingkat internasional.

Berdasarkan masukan dari rapat, ketua rapat akan membuat konsep laporan ketiga dengan rekomendasi lebih pendek, yang mengundang reaksi berbeda dari anggota kelompok kerja. Karena ada perbedaan cukup mencolok, rapat ini berakhir tanpa kesepakatan laporan akhir. Ketua Kelompok Kerja akan menyiapkan ringkasan yang akan didiskusikan pada sesi 21 di Commission on Science and Technology for Development (CSTD) pada Mei 2018.

TREND KEBIJAKAN DIGITAL BULAN JANUARI

Sambungan dari halaman 1

Di Inggris, diskusi beralih pada harga yang dibayar bila tidak melakukan apapun. Perusahaan Internet diberi istilah 'pengambil keuntungan yang lalim' oleh Menteri Dalam Negeri. Dia menyatakan karena perusahaan tersebut telah membuat pemerintah harus mengeluarkan banyak sumber daya, maka pemerintah mempertimbangkan untuk memberlakukan pajak pada mereka ketika mereka gagal membantu mengidentifikasi dan menghapus konten ekstrimis.

Komisi Eropa juga menerapkan penekanan yang sama. Komisi Urusan Dalam Negeri dalam sebuah rapat antara Komisi Eropa dengan perusahaan Internet meminta platform-platform Internet untuk menghapus konten ilegal paling lambat dua jam.

Pertarungan melawan konten ilegal menjadi salah satu dari berbagai isu di tahun 2017. Uni Eropa mengakui bahwa para perusahaan itu telah memberikan kemajuan berarti terkait komitmen mereka, tapi perkembangan ini memberikan keyakinan pada pemerintah bahwa perusahaan itu seharusnya bisa bertindak lebih banyak.

Dalam debat ini, dua perhatian utama tetap mengemuka. Perjuangan melawan konten ekstrimis akan menyertakan proses identifikasi dan pengusutan kriminal. Pemerintah telah meminta para perusahaan agar memperlemah sistem enkripsi mereka, sesuatu yang akan berdampak pada hak privasi pengguna. Bagaimana kedua hal ini bisa seimbang? Selain itu, dengan menekan perusahaan untuk berlaku lebih cepat, apakah pemerintah memindahkan tanggung jawab untuk mengawasi isi Internet pada jaringan sosial?

Perencanaan tindakan hukum untuk menghadapi berita bohong

'Menyebarkan berita bohong bisa membantu pencapaian tujuan lebih spesifik, memengaruhi keputusan politik dan melayani kepentingan ekonomi,' kata Paus Francis.

'Menyebarkan berita bohong bisa membantu pencapaian tujuan lebih spesifik, memengaruhi keputusan politik dan melayani kepentingan ekonomi,' kata Paus Francis. Presiden Perancis mengumumkan rencana ini awal bulan melalui undang-undang baru di mana para hakim bisa memblokir situs atau akun tertentu, terutama selama pemilihan umum, dan mengharuskan

platform Internet untuk membuka nama-nama yang mendanai konten tersebut. Perdana Menteri Malaysia juga membuat pengumuman serupa, mengatakan bahwa peraturan semacam itu bisa mencegah pemberontakan atau mencegah proses pemilihan umum yang terdampak dari berkembangnya berita palsu.

Para pemimpin Inggris dan Perancis percaya bahwa berita palsu adalah hasil dari propaganda anti-Barat yang disebarkan negara seperti Rusia. Ini juga membawa keinginan politik kuat untuk mengekang masalah berita bohong karena pemerintahan takut isu tersebut akan memengaruhi opini publik selama masa kampanye. Mengingat keinginan politik yang kuat, pertanyaannya adalah, apakah perusahaan Internet akan berhasil memenuhi tuntutan itu?

Perpajakan untuk ekonomi Internet kembali menjadi fokus

Perhitungan baru untuk perpajakan bermunculan di banyak wilayah dunia, termasuk pengungkapan Bloomberg soal skema penghindaran miliaran pajak yang dilakukan Google, membuat isu perpajakan kembali mengemuka bulan ini.

Pengadilan Tinggi Amerika Serikat akan meninjau kembali peraturan pajak tahun 1992 yang telah membuat Internet sebagai lahan 'bebas pajak' di Amerika Serikat di mana para peritel hanya diberi beban pajak apabila mereka memiliki perwakilan fisik. Beberapa negara di ASEAN seperti Singapura, Thailand dan Malaysia juga memperkenalkan perpajakan untuk penjualan e-Dagang atau semacamnya.

Menurut Bloomberg, Google mempunyai dua struktur yang dikenal dengan 'Double Irish' dan 'Dutch Sandwich', di mana perusahaan itu telah memindahkan €15,9 miliar keuntungan ke perusahaan di Belanda yang tidak memiliki pegawai, lalu ke mailbox di Bermuda milik organisasi yang terdaftar di Irlandia. Merespon kritik tersebut, CEO Google mengatakan siap membayar pajak lebih banyak, tetapi memerlukan kepastian di mana harus membayarnya. Dalam intervensinya saat rapat tahunan WEF di Davos, CEO Google mendorong Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) untuk mengambil posisi utama dalam memberikan solusi baru.

Para pemerintah sudah lama tidak nyaman dengan perusahaan Internet yang menghindari pembayaran pajak dengan cara mencari wilayah dan aturan hukum yang menguntungkan mereka. Pada tahun 2017, sejumlah negara Uni Eropa sudah mengusulkan adanya peraturan perpajakan baru. Usulan ini diterima dengan reaksi beragam. Ketika debat memunculkan perhatian terhadap kemungkinan adanya Eropa dengan dua kutub, sebagian negara mengadopsi peraturan pajak baru sedangkan sebagian lain tetap pada status quo, beberapa negara mengatakan bahwa tantangan untuk menghitung pajak ekonomi digital lebih baik diatur di ranah lebih global.

OECD dan Komisi Eropa diharapkan bisa mengeluarkan laporan mereka terkait perhitungan pajak di awal tahun 2018. Terkait dengan pertanyaan di mana pajak itu harus dibayar, dokumen perhitungan pajak baru ini harus juga mampu menjawab apa yang kena pajak.



KEBIJAKAN DIGITAL: PERKEMBANGAN BULAN JANUARI

Barometer bulanan mengikuti perkembangan kebijakan publik untuk isu spesifik Tata Kelola Internet dalam debat kebijakan publik dan menampilkan tren utama dengan membandingkan isu setiap bulan. Barometer ini menunjukkan munculnya isu spesifik di Tata Kelola Internet dibandingkan bulan sebelumnya. [Baca perkembangan masing-masing isu di sini.](#)

Arsitektur Tata Kelola Internet Global



Relevansi Tetap

World Economic Forum meluncurkan Pusat Keamanan Siber Global yang akan fokus pada kejahatan siber dan aplikasi dari teknologi baru di keuangan, kesehatan, telekomunikasi dan mobilitas. Berpusat di Jenewa, organisasi otonom ini akan mengumpulkan inisiatif yang sudah ada dari pemerintah, sektor swasta, para ahli dan penegak hukum. Lembaga ini juga akan membentuk perpustakaan independen yang berisi praktik terbaik siber dan bekerja menuju peraturan tepat guna serta lincah di keamanan siber.

Pembangunan Berkelanjutan



Relevansi Tetap

Komisi Pita Lebar PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan telah membuat target baru untuk menyambungkan setengah dari populasi yang belum terkoneksi di tahun 2025. Target ini, yang dipublikasikan di *2025 Targets: Connecting the other Half* termasuk akses ke Internet pita lebar (*broadband*) ke 75% populasi dunia, 65% di negara berkembang, dan 35% di negara belum berkembang.

Keamanan



Relevansi Meningkat

Para periset menemukan kerentanan sangat kritis di keping prosesor yang dibuat oleh AMD, ARM, Qualcomm dan perusahaan lain. Dua penyerangan terakhir membuat para penyerang mendapatkan akses ke inti program sistem operasi komputer serta mengambil data yang dilindungi.

Departemen Perdagangan dan Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat telah mengeluarkan rancangan laporan - terbuka untuk konsultasi publik - berjudul *Enhancing the Resilience of the Internet and Communications Ecosystem Against Botnets and Other Automated, Distributed Threats*. Laporan tersebut merekomendasikan untuk membuat standar keamanan dasar untuk perangkat IoT di aplikasi rumah tangga dan industri, dan mempromosikan adopsi internasional melalui kerja sama bilateral dan penggunaan standar internasional.

Lembaga ini juga mendorong upaya lebih dari pihak industri untuk mengembangkan solusi dalam mencegah dan mengurangi ancaman yang disebarluaskan. Jepang dan Estonia mengumumkan bahwa mereka akan memperkuat kerja sama dalam keamanan siber, terutama dalam terorisme siber. Jepang juga akan bergabung dengan Pusat Kerja Sama Pertahanan Siber NATO yang berpusat di Tallinn, Estonia.

Peraturan Jerman yang baru telah berlaku, mewajibkan platform Internet dengan lebih dari dua juta pengguna untuk secara proaktif melaporkan dan menghapus konten ilegal dengan segera. Tekanan terhadap perusahaan Internet untuk menangani konten ilegal juga menguat di Inggris dan Uni Eropa.

Singapura, yang mulai memimpin ASEAN untuk 2018, memilih e-dagang sebagai prioritas. Ekonomi digital ASEAN diproyeksikan mencapai \$200 miliar pada 2025.

E-Dagang dan Ekonomi Internet



Relevansi Meningkat

Uni Eropa telah mulai mengerjakan program 2018 mereka. Fokusnya adalah mengadopsi peraturan yang tertunda akibat strategi Satu Pasar Digital. Dua arahan yang diajukan untuk meningkatkan e-dagang, di mana Komisi akan berusaha menyelesaikannya tahun ini, adalah Arahan Konten Digital dan Arahan Barang Daring.

Google dilaporkan memindahkan miliaran penghasilan ke Bermuda untuk menghindari pajak, sebagaimana diungkap oleh Bloomberg. Mengikuti perkembangan e-dagang di Asia Tenggara, beberapa negara ASEAN memperkenalkan, atau mempertimbangkan untuk memperkenalkan, pajak untuk penjualan e-dagang.

Negosiasi dagang antara Uni Eropa dan beberapa negara Amerika Latin meningkat. Pembicaraan Uni Eropa-Meksiko telah dilanjutkan, dan pembicaraan Uni Eropa-Merkosur juga diharapkan berlanjut dalam waktu dekat.

Hak Digital



Relevansi Meningkat

Dalam persiapan untuk mulai diterapkannya Regulasi Proteksi Data Umum Uni Eropa, ICANN telah mengusulkan model untuk memastikan kesesuaian pada kebijakan WHOIS dengan aturan proteksi data. Ketiga model tersebut mengusulkan akses berlapis ke data registrasi nama domain, sesuatu yang bertentangan dengan kebijakan saat ini yang mengizinkan akses terbuka terhadap data tersebut.

Perancis telah menambahkan data dan kecerdasan buatan ke dalam daftar sektor yang membutuhkan perizinan dari negara sebelum perusahaan dibeli oleh investor asing. Menteri Keuangan Perancis mengisyaratkan bahwa investor asing tidak seharusnya diizinkan menjual data penduduk.

Sejumlah pemblokiran dilaporkan: di Kongo, kementerian telekomunikasi telah memutus akses ke Internet sejalan dengan berlanjutnya protes antipemerintah. Pemerintah Iran telah mematikan media sosial dan memutus akses Internet sebagai respon terhadap protes; aplikasi online seperti Toosheh (untuk mengunduh materi melalui satelit) dan Torjani (sumber daya untuk korban kekerasan domestik) menyebar untuk membantu pengguna, terutama perempuan, tetap berfungsi secara daring walaupun ada kontrol pemerintah seperti di atas.

Yurisdiksi dan isu hukum



Relevansi Tetap

Apple telah mendirikan pusat penyimpanan data baru di Cina untuk mematuhi aturan negara tersebut. Perjanjian antara Apple dan Cina menyatakan bahwa semua informasi individu dan dokumen pengguna di Cina yang disimpan di iCloud akan dibagi-pakai dengan Guizhou-Cloud Big Data dan dapat dievaluasi dan diteliti lebih jauh oleh otoritas Cina. [🔗](#)

Sekitar 300 perusahaan, kelompok, dan individu telah mengajukan dokumen berisi pertimbangan ke Mahkamah Agung Amerika Serikat, untuk mendukung Microsoft dalam pertarungan panjang dengan pemerintah Amerika terkait akses ke e-mail yang ada di server Microsoft di Irlandia. [🔗](#) Beberapa yang mengajukan dokumen tersebut di antaranya, Komisi Eropa mewakili Uni Eropa dan reporter khusus PBB untuk Hak Kebebasan Pribadi.

Infrastruktur



Relevansi Tetap

Google berencana membangun tiga kabel bawah laut di 2019 untuk memperluas infrastruktur komputasi awan mereka. [🔗](#) Kabel pertama, disebut kabel Curie, akan menghubungkan Los Angeles dan Chili; kabel kedua, Havfrue, dibangun bekerja sama dengan Facebook, akan menghubungkan Amerika Serikat dengan Denmark dan Irlandia; kabel ketiga, untuk wilayah Pasifik, akan bermula dari Hong Kong sampai ke Guam. Dengan tiga koneksi ini, Google telah memiliki investasi langsung di 11 sistem kabel.

Sejalan dengan memorandum Presiden Trump untuk *Memperkuat Kebijakan Amerika Serikat terhadap Kuba*, [🔗](#) AS sedang menguji tantangan teknologi untuk memperluas akses Internet di Kuba.

Netralitas Jaringan



Relevansi Meningkatkan

Mengikuti pemungutan suara Desember oleh Federal Communications Commission (FCC) Amerika Serikat untuk mencabut aturan netralitas jaringan, wakil rakyat di beberapa negara bagian AS mengajukan usulan undang-undang untuk menerapkan prinsip netralitas jaringan di tingkat negara bagian. Senat AS diharapkan untuk memungut suara pada rancangan undang-undang yang akan membalikkan aturan di mana FCC telah mencabut aturan netralitas jaringan. [🔗](#) Undang-undang tersebut saat ini telah lolos uji komite dan langsung masuk ke pemungutan suara Senat.

Pada saat yang sama, AT&T meminta agar Undang-undang Internet diadopsi oleh Kongres AS. [🔗](#) Kritikus berpendapat permintaan tersebut ditujukan kepada perusahaan Internet seperti Facebook, Amazon, dan Google, yang selama ini tidak menjadi subyek penyelidikan regulasi seperti dialami Internet Service Provider (ISP). [🔗](#)

Teknologi Baru, IoT, AI dll

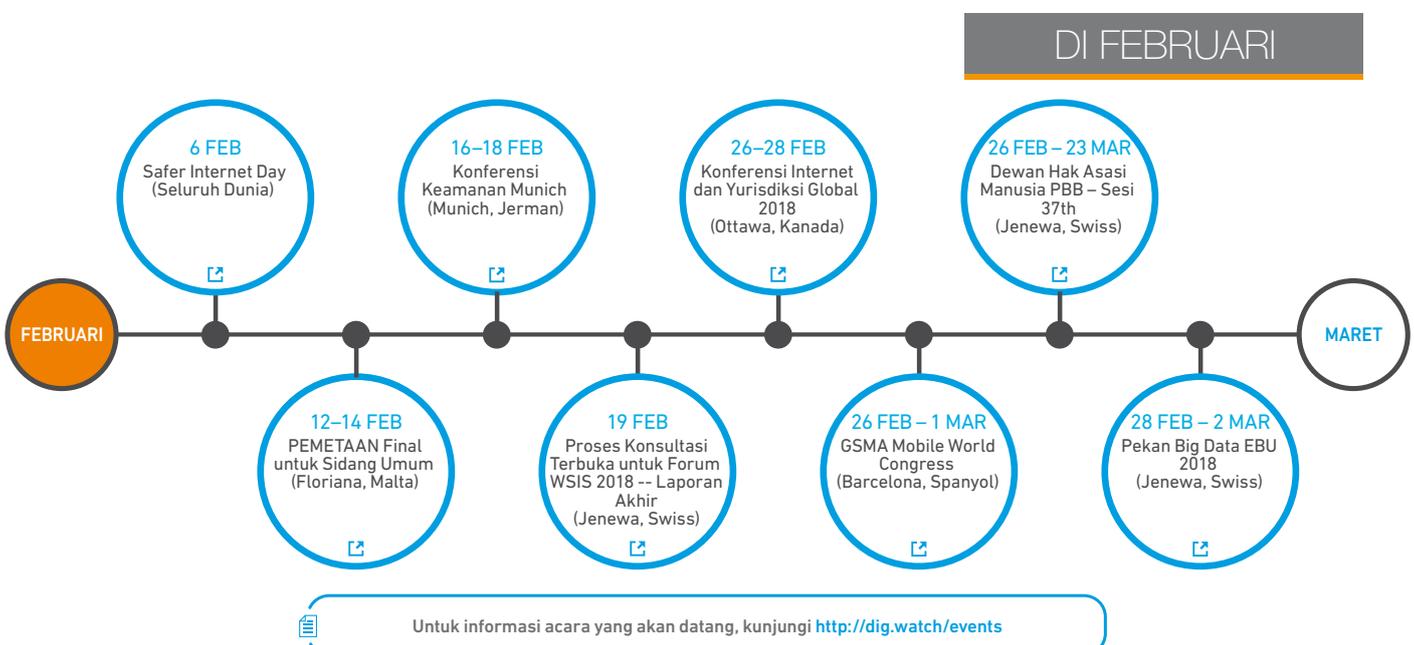


Relevansi Tetap

Masih terkait dengan Perencanaan Pembangunan Kecerdasan Buatan Generasi Baru, [🔗](#) yang diumumkan tahun 2017, China akan membangun taman teknologi untuk lebih dari 400 perusahaan yang bergerak di kecerdasan buatan, dengan investasi USD\$2,1 miliar. [🔗](#)

Tahun 2020, setengah dari kendaraan baru di Cina akan menggunakan energi AI. [🔗](#)

Di Stockholm, warganya bisa menggunakan bis tanpa supir dengan gratis selama masa uji coba yang dilakukan oleh Ericsson bekerja sama dengan Kota Stockholm. [🔗](#)



PERTEMUAN TAHUNAN WEF 2018: PARA PEMIMPIN DUNIA MEMIKIRKAN ISU KEBIJAKAN DIGITAL

Davos, 23 - 26 Januari adalah pertemuan tahunan ke-48 WEF. WEF dihadiri para pemimpin negara dan pemerintah, perwakilan tingkat tinggi dari organisasi internasional, dan CEO dari perusahaan besar. Kebijakan digital adalah salah satu isu penting yang didiskusikan. Kami meringkas diskusi selama WEF dalam topik yang memaknai perkembangan teknologi dalam perspektif berbasis manusia dan inklusif.

Digitalisasi dan AI: Bagaimana memastikan bahwa keuntungannya lebih banyak daripada risikonya?

Ekonomi digital, perkembangan teknologi AI dan otomatisasi menciptakan peluang untuk pembangunan, tetapi juga meninggalkan 'banyak kebingungan dan orang merasa tertinggal', seperti ungkapan Angela Merkel, Kanselir Jerman. Jadi bagaimana kita menjembatani evolusi digital, kepentingan bisnis dan hak asasi serta keinginan manusia?

Perdana Menteri Inggris, Theresa May mengatakan bahwa perubahan yang dibawa AI dan teknologi harus 'berguna untuk semua'. Untuk itulah, 'kerja sama internasional dibutuhkan dalam membangun pemahaman bersama bagaimana memastikan unsur keamanan, etika dan inovasi bisa berjalan dalam pelaksanaan AI'. Presiden Perancis Emmanuel Macron juga ikut menyuarakan hal ini. Macron menggarisbawahi pentingnya kerja sama internasional, 'untuk mempromosikan teknologi, juga memutuskan beberapa prinsip'.

Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengatakan, bagi banyak orang, 'teknologi menguntungkan hidup mereka, tetapi juga ancaman bagi pekerjaan.' Amat mendesak untuk memastikan bahwa keuntungan perkembangan teknologi haruslah dirasakan lebih banyak masyarakat. Theresa May menekankan tiga area utama yang bisa dikerjakan yaitu fokus pada pendidikan dan pelatihan, meningkatkan investasi publik dalam riset dan pembangunan, serta mengadaptasi peraturan terkait kepegawaian agar bisa berjalan bersama dengan teknologi sambil tidak lupa melindungi hak utama. Narendra Modi, Perdana Menteri India menambahkan bahwa 'kita harus mendemonstrasikan dengan aksi bahwa teknologi tidak akan mengambil pekerjaan. Malahan, teknologi akan menciptakan pekerjaan baru di area dan cara yang lebih baru'.

Agar negara bisa berjuang maksimal dalam revolusi industri keempat, menurut Trudeau, pendidikan sangatlah penting. Namun, sistem pendidikan harus beradaptasi untuk teknologi baru, seperti kata CEO Alibaba Jack Ma dan banyak orang lain mengungkap.

Banyak yang menggarisbawahi pentingnya pendekatan berbasis manusia untuk perkembangan teknologi. Ma mengatakan bahwa teknologi 'harus mendukung manusia' kendati May menggarisbawahi bahwa 'memanfaatkan kekuatan teknologi adalah [...] fundamental untuk kemajuan kemanusiaan'. Salah satu cara untuk memastikan hal ini terjadi adalah adanya etika, transparansi dan keterbukaan dari inti utama kemajuan teknologi, sebagaimana CEO Google Sundar Pichai dan lainnya mengakui.

Kepercayaan dan tanggung jawab di abad digital: Apakah kita perlu peraturan?

Teknologi digital bisa memperbaiki hidup masyarakat. Ada banyak peluang untuk hal ini bila manusia percaya pada teknologi dan perusahaan di baliknya. Bagaimana membangun kepercayaan seperti itu adalah pertanyaan terbuka.

Untuk May, jawabannya adalah kombinasi antara peraturan, kebijakan dan norma sosial. Dia kembali mengulang pentingnya kebijakan baru yang dengan jelas mendefinisikan tanggung jawab perusahaan, misalnya dalam kasus konten ekstrimis. Namun, perundangan juga tidak bisa menyelesaikan semua persoalan. Ketika sampai pada isu 'kebencian daring dan perundangan, kita perlu norma dan ekspektasi tentang bagaimana masyarakat yang beradab bisa saling berinteraksi'.

Seruan kuat untuk peraturan baru di ekonomi digital datang dari George Soros. Kendati mengakui bahwa perusahaan seperti Facebook dan Google 'seringkali punya peran inovasi dan memerdekakan', dia mengingatkan bahwa mereka 'telah tumbuh menjadi kekuatan monopoli' dan telah mulai 'eksploitasi lingkungan sosial'. Model bisnis baru mereka memiliki dampak sangat serius untuk berfungsinya demokrasi. Hal ini membutuhkan 'peraturan lebih ketat yang bertujuan pada mempertahankan kompetisi, inovasi dan akses universal yang terbuka dan adil'.

Industri sendiri juga telah menyadari pentingnya kehadiran peraturan baru. CEO Salesforce Marc Benioff berargumentasi bahwa 'perusahaan teknologi telah mendapatkan fasilitas bebas dari peraturan, dan itu harus berubah', terutama ketika sampai pada isu tanggung jawab dan akuntabilitas. Hal sama disepakati CEO Uber Dara Khosrowshahi: 'Di mana pembuat kebijakan dapat memainkan peran adalah akuntabilitas. [...] Saya meminta pembuat kebijakan sangat tegas dengan akuntabilitas'.



"AI harus membantu manusia. Teknologi harus setiap saat berbuat sesuatu yang memungkinkan manusia beraksi, bukan sebaliknya," kata CEO Alibaba Jack Ma, di rapat WEF, Davos.
 Credit: World Economic Forum / Ciaran McCrickard

REFLEKSI 2018: PREDIKSI 10 TERATAS

Internet rentan terhadap perpecahan di masyarakat global, yang hampir pasti akan meningkat seiring krisis multilateral. Apabila krisis ini berdampak terhadap peningkatan pembatasan pergerakan manusia, kapital dan barang antar negara, hal yang sama akan terjadi pada ekonomi digital. Berkaca pada krisis ini, penting untuk menggunakan perbedaan yang terjadi pada konvergensi. Ada 10 area perkembangan yang perlu dilihat dengan lebih jeli di tahun 2018.

01  **GDPR: Data di pusat politik digital**
Mulai berlaku 25 Mei, GDPR akan memiliki dampak signifikan untuk model bisnis industri Internet, yang berbasis monetisasi data. Data juga akan menjadi agenda penting untuk organisasi internasional di bidang kesehatan, kemanusiaan dan isu lainnya. [🔗](#)

02  **Geopolitik keamanan siber: Pencarian mekanisme tata kelola yang baru**
Proses pencarian mekanisme kebijakan untuk menangani keamanan siber semakin tegang. Beberapa solusi sudah menjadi pertimbangan: Kelompok Pakar Pemerintah PBB ke-6, Kelompok Kerja Terbuka PBB, Konferensi Perlucutan Senjata, Komite Penggunaan TI Damai, atau revisi ITR untuk mencakup keamanan siber. [🔗](#)

03  **Perdagangan digital dan ekonomi Internet**
Dengan gagalnya Konferensi Menteri WTO untuk memulai negosiasi e-Dagang, beberapa negara mulai membangun rezim plurilateral. Satu tantangannya adalah bagaimana menggambarkan perdagangan dari beberapa isu yang memengaruhinya seperti keamanan siber dan perlindungan data. Ekonomi Internet akan terdampak oleh isu global seperti perlindungan data, perpajakan dan peraturan kepegawaian. [🔗](#)

04  **Pengadilan: Sang pembuat kebijakan digital**
Para pengguna Internet dan organisasi terdampak semakin menggunakan pengadilan dalam mencari jalan keluar untuk persoalan digital. Hakim semakin menjadi pengambil keputusan *de-facto* untuk kebijakan digital, seperti kasus hak untuk dilupakan dan keputusan lain di Pengadilan Hukum Uni Eropa. Pengadilan lain juga mengikuti gejala ini dengan mulai membentuk beragam keputusan kebijakan digital. [🔗](#)

05  **AI: Antara pertimbangan filosofi dan aplikasi praktis**
Debat terkait risiko dan keuntungan AI akan terus berlanjut di tahun 2018, mengikutsertakan wirausahawan, para filsuf, politisi dan masyarakat umum. Pertanyaannya termasuk otomatisasi dan masa depan pekerjaan, pajak untuk robot, perlindungan privasi dan peraturan terkait senjata otonom mematikan. [🔗](#)

06  **Bitcoin dan mata uang kripto: antara keberhasilan dan kehancuran**
Kemajuan mata uang kripto telah membuka banyak pertanyaan terkait kebijakan. Apakah kemajuan pesat ini yang menyebabkan gelembung? Apa peran dari pembuat kebijakan untuk mencegah timbulnya kehancuran? Pada tahun 2018, banyak pemerintah akan fokus pada penawaran koin serta risiko penggunaan mata uang kripto untuk pencucian uang dan penghindaran pajak. [🔗](#)

07  **Kebijakan konten: berita palsu dan kekerasan ekstrim online**
Berita palsu akan menempati posisi penting di agenda kebijakan, karena banyak negara yang mulai memperkenalkan perundangan baru untuk melawan fenomena ini. Kritik utama adalah kebijakan itu berpotensi membuka kesempatan sensor. Beberapa pihak mengajukan lebih baik fokus untuk membangun budaya digital dan pemikiran kritis untuk warga negara. [🔗](#)

08  **Netralitas jaringan: Dampak global akibat peraturan Amerika Serikat**
Keputusan Amerika Serikat untuk meniadakan netralitas jaringan telah memicu debat tentang bagaimana netralitas jaringan bisa dilindungi di Amerika Serikat dan apakah hal ini akan berdampak pada negara lain. Netralitas jaringan dan *zero rating* akan tetap menjadi agenda penting di negara berkembang, sementara isu platform atau netralitas data akan bergerak lebih maju. [🔗](#)

09  **Enkripsi: Tekanan lebih untuk akses pintu belakang**
Pemerintah akan terus menekan perusahaan Internet untuk menyediakan akses pintu belakang terhadap data pengguna atau mengurangi enkripsi. Perusahaan Internet akan mencari kerangka peraturan yang diprediksi membuat mereka bisa berbagi data dengan badan penegak hukum, untuk melindungi mereka dari tekanan politis. [🔗](#)

10  **ICANN: identitas daring, yurisdiksi dan tata kelola**
Kemungkinan besar, ICANN akan berada di luar pusat kebijakan, walaupun dua isu akan tetap mengemuka. Saat politik sudah mulai fokus pada identitas dan simbolisme, identitas daring dalam DNS akan menjadi isu politik besar, misalnya dalam kasus .amazon. Ketika tiba pada isu yurisdiksi, kita akan melihat debat yang lebih fokus pada imunitas parsial untuk ICANN. [🔗](#)

Silakan baca lebih lanjut prediksi tahun 2018 di 'A tipping point for the Internet: Prediction for 2018', oleh Dr Jovan Kurbalija. [🔗](#)

KAJIAN KEBIJAKAN DIGITAL: PERKEMBANGAN UTAMA TAHUN 2017



pengembangan sistem senjata otonom mematikan.

Januari adalah bulan di mana umumnya kita melihat perkembangan masa lalu. Geneva Internet Platform mengikuti tren ini dengan 20 Perkembangan Teratas di 2017, [menyampaikan kilasan perkembangan utama yang membentuk kebijakan digital tahun lalu.](#)

Salah satu perkembangan utama tahun lalu adalah sektor swasta mengusulkan norma untuk memproteksi ruang siber. Microsoft, misalnya, menyarankan agar pemerintahan memberi perhatian penuh pada norma siber yang muncul di tahun-tahun belakangan melalui Konvensi Digital Jenewa. Selama 2017, proposal tersebut memicu banyak debat pada kemungkinan adanya mekanisme internasional yang baru terhadap keamanan siber, khususnya dalam konteks berakhirnya GGE PBB ke-5 tanpa kesepakatan.

Penyebaran konten ekstrem dan berita bohong membuat pemerintahan bertekad untuk meningkatkan tekanan pada perusahaan Internet agar mengambil tanggung jawab lebih besar terhadap konten yang mereka tayangkan. Industri menanggapi dengan inisiatif dan tindakan baru, seperti Forum Internet Global untuk Menangkal Terorisme, tetapi tekanan tetap berlanjut.

Pemerintahan semakin sadar akan potensi kecerdasan buatan dan memulai menyusun rencana strategis untuk menempatkannya di posisi terdepan dalam pengembangan. Namun, ada juga kekhawatiran tentang dampak otomatisasi dan kecerdasan buatan pada lapangan pekerjaan dan masyarakat secara umum. Pakar kecerdasan buatan memperingatkan untuk menentang

Perkembangan utama kebijakan digital lain di 2017 termasuk: WannaCry menjadi *ransomware* terbesar dalam sejarah, kebocoran data dan meningkatnya isu pengungkapan kelemahan, pengadilan terus membentuk kebijakan digital dan pemerintahan mulai mengisi kekosongan peraturan, bitcoin dan blockchain menarik lebih banyak perhatian, dan kebebasan Internet menurun karena pemblokiran meningkat. [Baca lebih lanjut tentang ini dan perkembangan lain.](#)

IGF 2017: MEMBANGUN DENGAN KONVERGENSI UNTUK MEMBENTUK MASA DEPAN DIGITAL KITA

Pertemuan Internet Governance Forum ke-12 yang dilaksanakan pada 18-21 Desember 2017, di Jenewa, dengan tema besar 'Membentuk masa depan digital anda'. Lebih dari 2.000 peserta terlibat dalam isu seperti data, keamanan siber, perdagangan digital, isu garda depan dan peningkatan kapasitas.

Dalam banyak diskusi, khususnya dalam konteks ajakan untuk mengatasi masalah terkait teknologi, nilai seperti demokrasi, kepercayaan dan kebebasan menjadi perhatian utama. Walaupun perbedaan mencuat ketika debat beralih dari masalah prinsip ke tindakan nyata dan detail, banyak juga kesamaan pendapat, seperti terdapat dalam Pesan Jenewa. Jika kita membangun atas dasar kesamaan ini serta selalu mengingat nilai dan prinsip dalam inti kemanusiaan, kita dapat membangun masa depan digital yang menjanjikan.

Geneva Internet Platform, dengan dukungan dari Sekretariat IGF, ICANN, Internet Society, dan DiploFoundation, menyediakan laporan seketika dari IGF 2017. [Baca laporan sesi, berita harian IGF, dan sebuah laporan final yang meringkas diskusi utama: dig.watch/igf2017](#)

Published on 10 January 2018

IGFREPORT FINAL REPORT FROM THE 12th INTERNET GOVERNANCE FORUM

dig.watch/igf2017

IGF 2017 Report prepared by the Geneva Internet Platform with support from the IGF Secretariat, ICANN, the Internet Society, and DiploFoundation

Reflecting on IGF 2017: The values at the core of our digital future

If the Internet is a mirror of society, as Vito Cerf argued¹² the Internet Governance Forum is a mirror of global digital politics. IGF 2017 reflected on a very turbulent year in global politics, with a number of issues resonating throughout the week: values on the Internet, digital future and frontier issues, dealing with data, cyber security and digital commerce, and the need for action and capacity development.

Perhaps succeeding better than in the real world, many convergences were created at the IGF, as the Geneva Message¹³ Credits. However, differences emerged as the discussion moved from principles to concrete action and details. For example, while there is shared understanding of the need for action to cyber-resilience, there are differences as to whether this should be done gradually through existing law, or through major action with the adoption of a cyber treaty.

Among the most frequently used words at this year's IGF, many relate to human values, such as: community, democracy, trust, and freedom. Values came into focus in many discussions on artificial intelligence (AI), fake news, the role of Internet companies, human rights, and others.

[Continue on page 2 and 3](#)

The opening ceremony of IGF 2017 on 18 December¹⁵ Credit: UN Photo/Jean Marc Ferré

IN THIS ISSUE	Commentary	1-3
	Thematic summary	4-9
	Highlights from the 4th Day	10-11
	How we did it	12

Click on the icons in the digital version to access session reports and additional information.



Langganan GIP Digital Watch terkini di <http://dig.watch>